



Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BADAN KEAHLIAN DPR RI Tahun 2022

*“ Bridging The Research To The Role And Functions Of Parliament
EVIDENCE BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING “*

Jakarta, 20 April 2022

EVALUASI DAN RENCANA KERJA BADAN KEAHLIAN



**PROGRAM KERJA TAHUN 2022
DISUSUN DENGAN MENGACU PADA
CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2021
DAN HASIL EVALUASINYA SERTA
DENGAN MEMPERHATIKAN RENCANA
STRATEGIS BADAN KEAHLIAN,
PERJANJIAN KINERJA BADAN
KEAHLIAN TAHUN 2021 SERTA ROAD
MAP DAN RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI DAN KEBUTUHAN DATA DAN
INFORMASI DPR RI YANG DINAMIS,
KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM 8
AREA PERUBAHAN.**

Rencana Aksi Area Perubahan 1

Manajemen Perubahan

Penguatan Manajemen Perubahan



1. Tim Reformasi Birokrasi

A. Membentuk Tim RB Badan Keahlian 2022

Pembentukan Tim RB BK tahun 2022, Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab Badan Keahlian dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui penugasan sebagai ujung tombak dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

B. Penyusunan Rencana Kerja RB Badan Keahlian 2022

Melaksanakan Rapat Kerja Badan Keahlian dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Rencana Aksi RB tahun 2022. Kegiatan ini dimaksudkan agar tercipta acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tugas dan Fungsi serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Keahlian.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB Badan Keahlian 2022

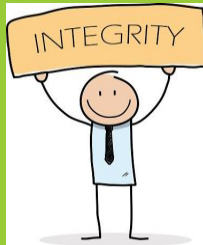
melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi RB agar terbangun komitmen bersama untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan tugas fungsi Badan Keahlian.



2. Penguatan Nilai Integritas

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan

Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI



Sosialisasi Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Keahlian.

Penerapan kegiatan Pengendalian Gratifikasi & Penanganan Benturan Kepentingan pada setiap pegawai di lingkungan Badan Keahlian dan terimplementasikan dalam setiap menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Penguatan Nilai Integritas

Keberhasilan mendapatkan Prestasi dalam pelaksanaan Zona Integritas di Lingkungan Badan Keahlian Tahun 2021

PUSAT KAJIAN ANGGARAN MENERIMA APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021



***MAKING CHANGE
MAKING HISTORY***



Terus melakukan penguatan nilai integritas pegawai serta;

Mempertahankan Prestasi dengan upaya peningkatan pelaksanaan nilai-nilai integritas oleh seluruh pegawai dalam unit kerja di lingkungan Badan Keahlian pada tahun 2022

Pelaksanaan ZI di Pusat PUU



3. Pengembangan dan Penguatan Agen Perubahan

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Agen Perubahan 2021

Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan agen perubahan tahun 2021 dengan rencana tindak agen perubahan tahun 2022

B. Penugasan Agen Perubahan

Pembagian Tugas dan tanggung jawab masing-masing Agen Perubahan yang ditunjuk

C. Pelatihan Agen Perubahan

Menugaskan agen perubahan dalam pelatihan agar dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sama perubahan

D. Menginventarisasi Rencana Tindak Agen Perubahan

Melakukan dokumentasi rencana tindak Agen Perubahan

E. Pertemuan Rutin Dengan Agen Perubahan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan rencana aksi

Penjadwalan pertemuan rutin dengan AP dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bentuk monitoring pelaksanaan rencana aksinya

F. Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan

Melakukan evaluasi terhadap Rencana Tindak Agen Perub.



4. Pengembangan Budaya Kerja dan Cara Kerja yang Adaptif

Internalisasi Tagline BK, Pusat2, dan 10 Nilai Kerja Badan Keahlian

Tindak lanjut dan evaluasi penerapan motto dan 10 Nilai Kerja Badan Keahlian pada setiap pegawai di lingkungan Badan Keahlian dan terimplementasikan dalam setiap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tindak lanjut program kerja 2021

Sinergitas Antar Pusat-Pusat dalam peningkatan dukungan keahlian

Koordinasi dan kolaborasi antar pusat-pusat dalam bentuk sinergitas SDM (para kapus, Pejabat Fungsional, staf TU) dan berbagai output pusat -pusat agar bisa saling mendukung dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi masing-masing pusat

Sepuluh Nilai Kerja Badan Keahlian

User Oriented Services

Sharing Data Minded

Neutral And Impartial

Knowledge Management
Based on IT

Research Based Output

Professionals And Ethics
Based

Interpreneurship Minded,
Innovative, Creative, Pro
Active, Efficient, Result And
Impact Oriented Working

Academic Cultured
Minded

Implement Pancasila Value
and the Guardian Of
National Interest

Networking Minded



Sinergitas Badan Keahlian dengan Tenaga Ahli AKD dalam peningkatan layanan dukungan keahlian

Pelibatan Tenaga Ahli dalam Pelaksanaan Kinerja Pusat-pusat tahun 2022.

Pelibatan Tenaga Ahli dalam Evaluasi Kinerja Tahun 2022

RENCANA AKSI AREA PERUBAHAN 2 DEREGULASI KEBIJAKAN

1. Identifikasi dan Pemetaan Regulasi

2. Deregulasi Aturan yang menghambat/ tidak sinkron/ tidak harmonis

- Identifikasi dan pemetaan peraturan di lingkungan BKD baru maupun yang menghambat/tidak sinkron/tidak harmonis oleh unit di lingkungan Badan Keahlian.
- Dalam pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut atas kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta pengembangan organisasi, dilakukan peninjauan beberapa peraturan Sekjen DPR RI yang dinilai Badan Keahlian menghambat pelaksanaan rencana aksi dikoordinasikan dengan Setjen DPR RI untuk mendapatkan upaya penyelesaian sebagai dasar dilakukan penyesuaian rencana aksi dengan segera.
 - Penyusunan konsep perubahan PermenPANRB tentang Perubahan Formasi Jabatan Fungsional di PU dan Puspanlak UU
 - Bekerjasama dengan Biro terkait dalam pembangunan aplikasi terkait database informasi peraturan perundang-undangan
 - Bekerjasama dengan Biro terkait dalam penyusunan persekjen terkait persekjen Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.
 - Bekerjasama dengan Biro terkait dalam permintaan perubahan Lampiran Perpres tentang jabatan Fungsional yang dapat direkrut sebagai PPPK
 - Bekerja sama dengan Biro terkait dalam penyusunan perubahan Persekjen terkait Tugas Belajar
 - Bekerjasama dengan Biro terkait dalam penyusunan PermenPAN RB terkait Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Akuntabilitas Keuangan dan Analis Legislatif

RENCANA AKSI AREA PERUBAHAN 3

PENATAAN ORGANISASI

Asessment organisasi berbasis Kinerja

Mencermati pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi organisasi sesuai dengan Permenpan RB No 20 Tahun 2018 yang dilakukan unit terkait



Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesment

Kajian Penyederhanaan Birokrasi

Mencermati dan mempelajari serta menindaklanjuti hasil penyusunan kajian serta pembahasan dengan unit kerja terkait berdasarkan usulan unit organisasi di dalam Setjen DPR RI maupun berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan

Membentuk Struktur Organisasi yang Tepat Fungsi

Melakukan evaluasi dan Melaksanakan ketentuan dalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RP sebagaimana telah diubah dengan Persekjen Nomor 24 Tahun 2021.

EVALUASI KELEMBAGAAN

Melakukan evaluasi kelembagaan di lingkungan BK

- 1. Mengusulkan penambahan Formasi jabatan pada TU Puspanlak**
- 2. Menyusun Draft perubahan PermenpanRB tentang Jabatan Fungsional Analis APBN**
- 3. Menyusun Draft Persekjen tentang JF Analis Pemantauan**
- 4. Melanjutkan proses pembentukan JF Analis Akuntabilitas Keuangan**
- 5. Melanjutkan proses pembentukan JF Analis Legislatif**
- 6. penambahan formasi pada setiap jenjang jabatan fungsional Perancang PUU terkait dengan pengembangan jenjang karir perancang dan kebutuhan lembaga**
- 7. Penyampaian Nama Tim Evaluasi Kelembagaan Badan Keahlian**

RENCANA AKSI AREA PERUBAHAN 4

Penataan Tatalaksana

evaluasi Proses Bisnis

Mengusulkan perubahan dan mengevaluasi Proses Bisnis oleh unit-unit

Penyusunan serta monitoring dan evaluasi SOP.

- Evaluasi ISO Pusat Kajian Anggaran Tahun 2021 di PKA
- Evaluasi dan penyusunan SOP di lingkungan Badan Keahlian sesuai dengan Persekjen Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI dan Persekjen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi pemerintahan Setjen DPR RI

Penerapan Tata Kelola SPBE

Pelaksanaan penerapan SPBE dilaksanakan di lingkungan Badan Keahlian dengan mengacu pada Persekjen Nomor 12 Tahun 2020 tentang RITIK Setjen DPR RI dan Persekjen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Setjen DPR RI



Pengelolaan Arsip

1. Mengundang Unit Terkait dalam Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penggunaan arsip inaktif, pemeliharaan arsip dinamis, dan penyusutan arsip dinamis.
2. Melakukan Pembinaan kearsipan ke unit-unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI



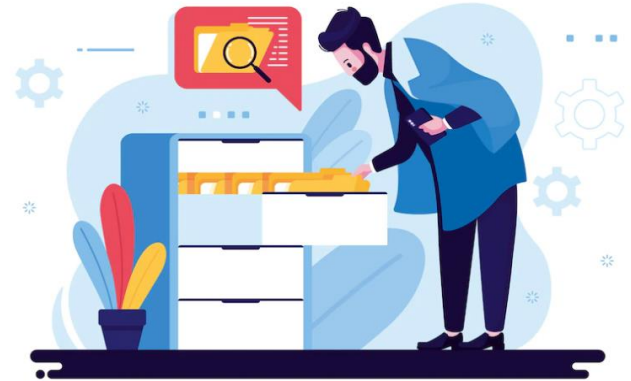
Keuangan dan Perencanaan

Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan serta pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan yang akan dilaksanakan tahun 2022

1. Mengevaluasi Pegawai yang mengikuti Bimtek Aplikasi SICAPUT
2. mengevaluasi Pegawai yang mengikuti Bimtek Aplikasi SINCAN
3. mengevaluasi Pegawai yang mengikuti Bimtek Aplikasi SAKTI

Pengelolaan Aset

1. Melakukan pengelolaan atas asset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku
2. Mengusulkan Pembaruan Daftar Barang Ruangan yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi BMN dan Kepala Pusat di Lingkungan Badan Keahlian



AREA PERUBAHAN 5

PERUBAHAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

SUB 1 PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI BERDASARKAN SISTEM MERIT

1

KEBUTUHAN PNS DAN PPASN

1. Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Tahap 2 Tahun 2022 sejumlah 7 orang sebagai lanjutan tahap I tahun 2021;
2. Usulan Penambahan Staf TU di Puspanlak karena adanya 2 Satker yaitu Satker Dewan dan Setjen dengan jabatan Penyusun Bahan Kebijakan, Pengelola Data dan Pengadminitrasi Umum;
3. Usulan Perubahan Lampiran Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 dengan memasukkan Analis Pemantauan sebagai salah satu jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK agar tahun 2023 bisa diusulkan Rekrutment PPPK Jabatan Analisis Pemantauan Tingkat Pertama, Madya dan Utama.
4. Tindak lanjut Penerimaan CPNS Tahun 2021 di lingkungan BKD

2

RETRIBUSI PEGAWAI

1. Tindak lanjut Mutasi Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Kapus PKAKN;
2. Tindak lanjut Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di TU BKD (1 orang).

3

USULAN CPNS TAHUN 2023

Mengajukan usulan Pengadaan CPNS Setjen DPR RI untuk ditempatkan di lingkungan BKD

- **PENERIMAAN CPNS BERBASIS PORTAL SSCASN BKN RI**

Hasil Seleksi Pengadaan CPNS Setjen DPR RI Tahun 2021 di lingkungan BKD:

1. PKA 4 orang;
2. PKAKN 3 orang;
3. Puspanlak UU 5 orang;
4. Pusat Kajian Legislatif 1 orang

- **SELEKSI PPNASN TAHUN 2022.**

mengadakan evaluasi PPNASN tahun 2022 dan rekrutmen PPNASN tahun 2023 di lingkungan Badan Keahlian.

- **MENYUSUN PEDOMAN SELEKSI**

1. Persekjen No. 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif;
2. Persekjen No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing;
3. Keputusan SEKJEN No. 958/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tahap 2 Uji Kompetensi Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif;
4. Pembentukan Tim Penguji Kompetensi Pengangkatan PNS dalam Jabatan

SUB 3 PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI

DATA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BKD TAHUN 2021.

1. Evaluasi Pemberian Tugas Belajar (S3);
2. Tindak lanjut Bimtek Aplikasi Keuangan (SINCAN, SICAPUT, SAKTI);
3. Tindak lanjut Bimtek Aplikasi Persuratan (E-Sign dan SNIPER);
4. Tindak lanjut Bimtek Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Website;
5. Usulan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Agen Perubahan;
6. Usulan Pelatihan Bahasa Inggris;
7. Usulan Bimtek Pedoman Kearsipan;
8. Usulan Bimtek Perancangan Undang-Undang;
9. Usulan Diklat Suncang dan diklat fungsional lainnya;
10. Usulan Diklat Kompetensi Manajerial;
11. Usulan Pelatihan SDM ASN Berbasis Kompetensi: TOT: Pengukuran Produktivitas.
12. Melakukan Kerjasama (Badan/Pusat-pusat) dengan Perguruan Tinggi/Lembaga dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keahlian.
13. Pengadaan Seminar Nasional terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi

SUB 4 PROMOSI JABATAN DILAKUKAN SECARA TERBUKA

**PENERAPAN POLA KARIR
PEGAWAI DI BKD SETJEN DPR
RI**

**Usulan Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Analis
Pemantauan Peraturan
Perundang-undangan
Legislatif melalui
Penyesuaian/Inpassing**

**PENGISIAN JPT DI BKD
SETJEN DPR RI**

**Penetapan Plt JPT Kepala
Pusat Kajian Legislatif**

SUB 5. PENETAPAN KINERJA INDIVIDU

1. Pelaksanaan Rapat Kerja Dalam Rangka evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan rencana Program Tahun 2022 di lingkungan BK
2. Tindak lanjut Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi E-kinerja Di Bk Setjen Dpr Ri oleh Analis Kepegawaian.
3. Penilaian Kinerja Individu melalui Pengisian Ppkp Tahun 2022
4. Penyiapan dokumen PPKP, dan lainnya tahun 2020 dan 2021 untuk kenaikan pangkat dan inpassing jabatan fungsional analis pemantauan pada Tahun 2022

SUB NO. 6 PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/KODE ETIK/KODE PERILAKU PEGAWAI

PEDOMAN PENGHARGAAN:

- a. Penyusunan kode Etik Puspanlak
- b. Tindak lanjut surat Edaran Kaban tentang mekanisme surat menyurat yang ditandatangani kepala Badan
- c. Rencana pemberian Penghargaan sebagai Analis APBN terbaik tahun 2022
- d. Rencana penilaian peer to peer Analis Pemantauan Tahun 2022

PEMBERIAN SANKSI DISIPLIN BERDASARKAN APLIKASI E-DISIPLIN:

1. Teguran Sanksi Disiplin Pusat Penelitian (29 orang);
2. Teguran Sanksi Disiplin Pegawai Puspanlak UU (1 orang);
3. Teguran Sanksi Disiplin Pegawai PUU (1 orang);
4. Teguran Sanksi Disiplin Pegawai PKA (7 orang).

RENCANA AKSI AREA PERUBAHAN PENGUATAN AKUNTABILITAS

6



Rapat Koordinasi evaluasi kinerja 2021 dan penyusunan rencana kerja 2022 Badan Keahlian



Keterlibatan Pimpinan

Rakor Badan Keahlian dalam Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja

Optimalisasi kapasitas SDM di lingkungan Badan Keahlian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja (MOU, Semnas, FGD)

Upaya peningkatan akuntabilitas di lingkungan Badan Keahlian dilakukan dengan supervisi berjenjang yang dilaksanakan hingga unit terkecil di lingkungan Badan Keahlian

**Evaluasi kinerja 2021 dan
penyusunan rencana kerja 2022
Badan Keahlian**

Penyusunan LKJ 2021

**Pengisian dan Penilaian Kinerja
dalam PPKP 2021**

Rapat Kerja Evaluasi kinerja 2021

**Rapat Kerja penyusunan program
kerja 2022**

**Pengisian Perjanjian kinerja dan
Sasaran Kinerja Pegawai 2022**

**Optimalisasi pelaksanaan checklist
catatan harian oleh atasan langsung**

**Rakor Badan Keahlian
dalam Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
rencana kerja**

**Rakor Badan Keahlian
dalam rangka evaluasi
rencana kerja dan
anggaran secara berkala
setiap triwulan**

**Menghadiri rapat BURT
membahas realisasi
anggaran dan kegiatan
per-triwulan**

**Optimalisasi
kapasitas SDM di
lingkungan Badan
Keahlian dalam
peningkatan
akuntabilitas
kinerja**

**Rapat koordinasi
badan keahlian
dalam rangka
evaluasi SDM**

**Evaluasi kinerja
PPN ASN di
lingkungan Badan
Keahlian pada
akhir tahun 2022**

RENCANA AKSI AREA
PERUBAHAN 7
PENGUATAN
PENGAWASAN



PENGUATAN PENGAWASAN

Pengendalian Gratifikasi

PUBLIC CAMPAIGN

IMPLEMENTASI

EVALUASI

PENERAPAN SPIP

SOSIALISASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN RESIKO UNIT

SOSIALISASI SPI

MONITORING DAN EVALUASI SPI

PENGADUAN MASYARAKAT

TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

EVALUASI TERHADAP PENANGANAN

PENGADUAN MASYARAKAT

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

WHISTLE BLOWING SYSTEM

SOSIALISASI PERSEKJEN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DUGAAN TINDAK PIDANA KKN DI LINGKUNGAN SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

BENTURAN KEPENTINGAN

SOSIALISASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- PENGUSULAN UNIT DALAM PENETAPAN ZI
- IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZI
- MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZI





RENCANA AKSI AREA PERUBAHAN 8

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1

Upaya inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mendorong perbaikan pelayanan publik menggunakan Proses Bisnis, SOP dan standar pelayanan yang berpedoman pada:

2

- 1.Kesesuaian Persyaratan
- 2.Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- 3.Kecepatan Waktu Penyelesaian
- 4.Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
- 5.Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6.Kompetensi Pelaksana/Web
- 7.Perilaku Pelaksana/Web
- 8.Kualitas Sarana dan prasarana
- 9.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

3



MELAKUKAN PENGUATAN STANDAR PELAYANAN



1 Membuat Maklumat Pelayanan pada seluruh layanan di lingkungan Badan Keahlian serta melakukan Reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan semua layanan keahlian.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 177 /SEKJEN/2020
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

MAKLUMAT PELAYANAN

"KAMI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN DALAM Mendukung TUGAS DAN
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"

SEKRETARIS JENDERAL,

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611141997031001



PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI MENYATAKAN BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK DALAM Mendukung PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEGISLASI YANG LEBIH PARTISIPATIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, BERINTEGRITAS, EFISIEN DAN EFEKTIF SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK"

JAKARTA, 3 SEPTEMBER 2021
KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

DR. LIDYA SUKANDAYATI, S.H., M.H.
NIP. 19700429198032001

Tata Cara Permohonan Analisis Ringkas Cepat



Langkah 2.

1. Tata Usaha memverifikasi kelengkapan permohonan, nama dan tema yang diminta
2. Tata Usaha meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran
3. Kepala Pusat menugaskan Analis APBN untuk memproses permohonan dimaksud.



Langkah 3

1. Proses pengerjaan kajian
2. Hasil kajian disampaikan kepada Tata Usaha untuk diserahkan kepada pemohon.



Langkah 4. Pemohon menerima hasil kajian Analisis Ringkas Cepat.

"Diterima oleh pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan disampaikan"



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI

"we believe accurate research can support parliament's scrutiny"

KOMITMEN PELAYANAN

"Dengan ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI berkomitmen akan memberikan pelayanan bidang keahlian yang terbaik guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan Undang-undang dan fungsi legislasi yang lebih inovatif, akuntabel, akurat, dan tepat waktu dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

JAKARTA, 19 APRIL 2022
KEPALA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Dra. Tanti Widyawati, M.Si.
NIP. 196310031988032001

PENGUATAN BUDAYA PERLAYANAN PRIMA

Peningkatan inovasi pelayanan

- a. Penyusunan Anotasi Undang – Undang Puspantak UU
- b. Penggunaan SMS Blast
- c. Info Legislasi PUU
- d. Info Singkat Puslit
- e. Isu Sepekan Puslit
- f. Budget Issue Brief
- g. Info Dwi Mingguan Badan Keahlian DPR
- h. Peningkatan jumlah kajian dan analisis pemantauan pelaksanaan undang-undang dari tahun ketahun
- i. matrik singkat perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 yang ditangani oleh Puspantak UU
- j. Info judicial review putusan MK pada setiap triwulan
- k. pengintegrasian Data Pusat2 dengan dengan Website Badan Keahlian, sehingga terjadi open dan *easy data* dikalangan badan keahlian.
- l. Penyusunan daftar peraturan pelaksana UU Cipta Kerja
- k. Pengintegrasian produk PKA dengan Apliasi Simponi dan melakukan link dengan Linktree yang dimiliki PKA
- l. Memasukkan Standar Pelayanan Analisis Ringkas Cepat di Pusat Kajian Anggaran dari yang sebelumnya tidak ada dan tidak dimasukkan dalam ISO 9001 2015 menjadi bagian dalam ISO 9001 2015.
- m. Redesign, optimalisasi, dan pengintegrasian data hasil kerja Pusat- Pusat di Badan Keahlian DPR melalui program Big Data Sekretariat Jenderal DPR RI
- n. Evaluasi dan peningkatan efektifitas penyampaian informasi melalui media sosial Pusat-Pusat di Lingkungan Badan Keahlian
- o. Evaluasi Bisniss Process-ISO 9001:2015 Pusat Kajian Anggaran.

Peningkatan kualitas dan efektifitas produk layanan di lingkungan Badan Keahlian

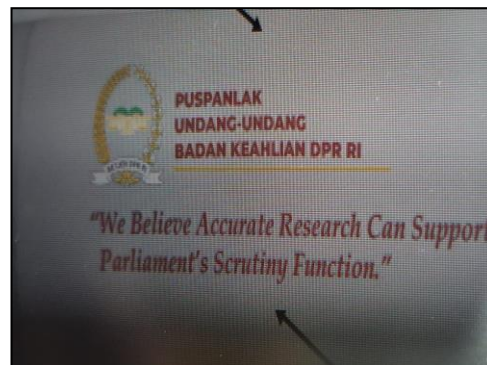




PENGUATAN BUDAYA PERLAYANAN PRIMA

Peningkatan inovasi pelayanan (2)

- a. *Tagline* Badan Keahlian
- b. *Tagline* Pusat Kajian Akuntabilitas Kajian Negara
- c. *Tagline* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

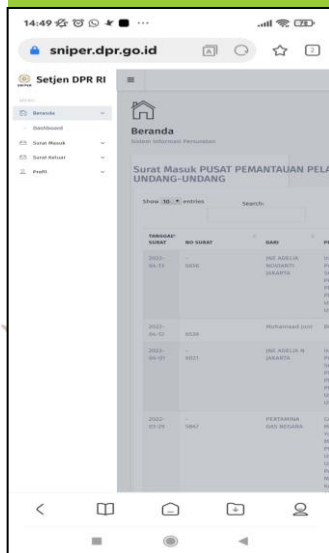




Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi Penggunaan Aplikasi penunjang pelaksanaan layanan administrasi dan Keuangan tahun 2022

Penimplementasian Aplikasi2 guna mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan

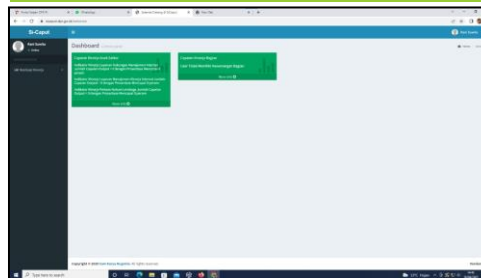
SNIPPER



LEGALITAS



SICAPUT



SINCAN



SEMAR

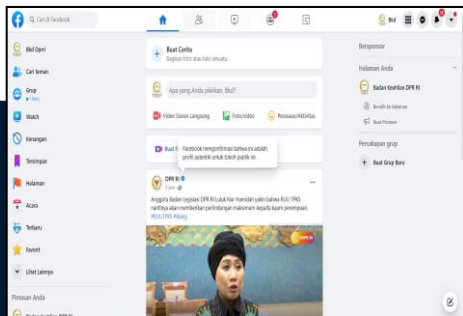




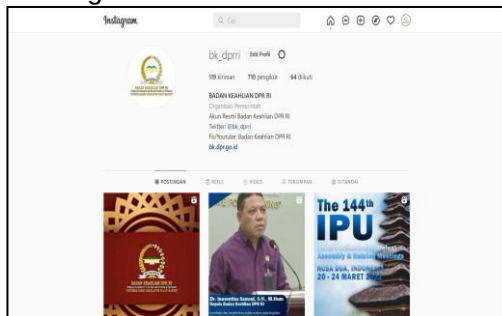
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Media Sosial Badan Keahlian dan Pusat-Pusat di lingkungan Badan Keahlian (Website, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube) tahun 2022

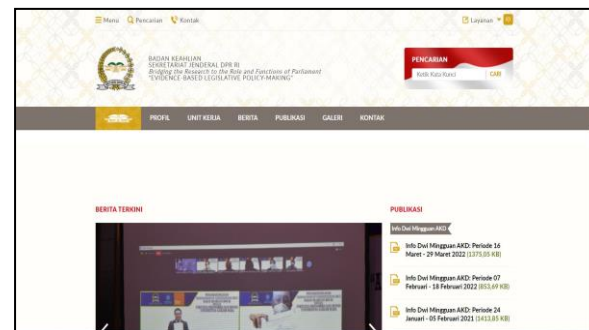
Facebook



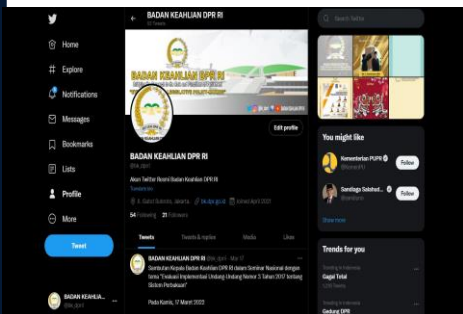
Instagram



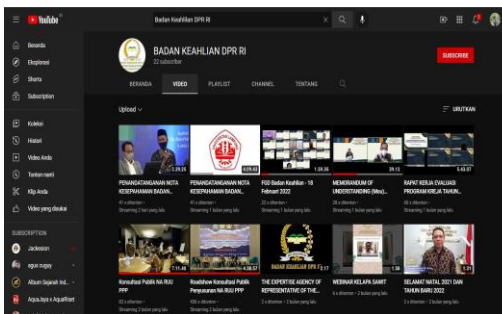
Website



Twitter



Youtube



1. Evaluasi dan penyempurnaan Website BK dan Pusat-pusat
2. Melakukan penyempurnaan video profil Badan Keahlian dan Pusat-Pusat di lingkungan Badan Keahlian
3. Pembangunan *Integrated Information System* BKD



Birokrasi

**Bersih &
Melayani**

TERIMA KASIH



**SIMPLICITY
IS THE SOUL OF
EFFICIENCY**

- Austin Freeman